

ANALISIS KERJASAMA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DALAM PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI: TINJAUAN PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE

Dea Aprillia¹⁾, Muhammad Farid Ma'ruf²⁾

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Surabaya

Correspondence

Email: deaaprillia.20005@mhs.unesa.ac.id

No. Telp:

muhammadfarid@unesa.ac.id

Submitted: 8 Desember 2024

Accepted: 17 Desember 2024

Published: 18 Desember 2024

ABSTRAK

Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan satu-satunya bandara yang dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proses pembangunan bandara ini melibatkan banyak pihak baik swasta maupun pemerintahan desa. Pada pelaksanaan pembangunan terjalin kerja sama terkait dengan penyediaan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui proses kerja sama yang terjalin dalam upaya penyediaan tenaga kerja lokal. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori *collaborative governance* menurut Ansel dan Gash (2008) dengan indikator penelitian yaitu: 1) *face to face dialogue*; 2) *trust building*; 3) *commitment to the process*; 4) *shared understanding*; dan 5) *intermediate outcomes*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kerjasama antara PT Wijaya Karya dengan Pemerintah Desa Grogol terjalin dengan cukup sesuai. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya dokumentasi secara tertulis baik dari pihak desa dan pihak PT Wijaya Karya, terutama terkait dengan MoU. Namun demikian, indikator *commitment to the process* dan *intermediate outcomes* dapat tercapai dengan baik. Rekomendasi penelitian untuk kerja sama Pemerintah Desa Grogol adalah dengan memperbaiki proses diskusi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan serta membuat MoU terkait dengan pelaksanaan kerja sama, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan komitmen dalam menjalankan kerjasama.

Kata Kunci: kerjasama; bandara; pemerintah; dan swasta

ABSTRACT

Dhoho Kediri International Airport is the only airport built under a government and business entity cooperation (KPBU) scheme. The process of building this airport involves many parties, both the private sector and village government. In the implementation of development, cooperation is established regarding the provision of local workers. This research aims to analyze and understand the cooperation process that exists in efforts to provide local workers. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The research focus uses collaborative governance theory according to Ansel and Gash (2008) with research indicators, namely: 1) face to face dialogue; 2) trust building; 3) commitment to the process; 4) shared understanding; and 5) intermediate outcomes. The results of the research findings show that the collaboration process between PT Wijaya Karya and the Grogol Village Government is quite appropriate. This happened because there was no written documentation from both the village and PT Wijaya Karya, especially regarding the MoU. However, indicators of commitment to the process and intermediate outcomes can be achieved well. The research recommendation for cooperation with the Grogol Village Government is to improve the discussion process and carry out outreach to communities affected by development and create an MoU related to the implementation of cooperation, so that it can strengthen trust and commitment in carrying out cooperation.

Keywords: cooperation; airport; government; and private

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan aspek yang perlu diperhatikan guna mencapai kesejahteraan suatu negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan terdiri dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Siagian dalam (Nasir, 2021) pembangunan merupakan suatu upaya yang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk tumbuh dan berubah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan di daerah menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena pembangunan daerah berkaitan dengan pemerataan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pembangunan di daerah perlu dilakukan dengan memikirkan aspek pembangunan berkelanjutan. Terdapat tiga aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, yakni berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial, dan berkelanjutan lingkungan, ketiga aspek ini harus berkembang dengan seimbang agar pembangunan tidak hanya terfokus dalam pertumbuhan ekonomi saja.

Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kewenangan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah “Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan memberikan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan ekonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”

Collaborative governance menjadi kunci utama dalam menghubungkan tiga pilar penting dalam pembangunan suatu daerah: negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan organisasi masyarakat sipil. Ansell dan Gash dalam (Mardiyanta, 2022) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah metode pengelolaan pemerintahan yang di dalam prosesnya melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara secara langsung, dengan orientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan tujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Tujuan dari *collaborative governance* adalah mengintegrasikan sinergi dan kerjasama antara ketiga pilar ini dalam semua tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Untuk memaksimalkan potensi setiap pilar dalam mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, sangat penting untuk menciptakan kondisi yang ideal.

Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang harus diperhatikan dalam pembangunan suatu wilayah. Perlu diperhatikannya pembangunan dalam sektor transportasi ini dikarenakan transportasi merupakan penunjang dalam pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*) suatu negara disamping mendorong mobilitas penduduk dan pemerataan pembangunan. Jenis transportasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia salah satunya adalah transportasi udara. Penumpang transportasi udara di Indonesia mengalami jumlah peningkatan yang cukup tinggi. Akan tetapi, kondisi sistem transportasi udara yang berupa bandar udara di Indonesia masih belum mencukupi. Hal ini dijelaskan lebih terperinci dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1 Keberangkatan Penerbangan Luar Negeri

Tahun	Pesawat (Unit)	Penumpang (Orang)
2018	119.082	18.247.272
2019	118.745	19.073.159
2020	34.018	3.612.521
2021	17.457	631.502
2022	47.073	7.108.207

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa keberangkatan pesawat untuk penerbangan luar negeri tahun 2022 tercatat sebanyak 47,1 ribu unit dengan jumlah penumpang 7,1 juta orang. Bila dibandingkan dengan tahun 2021, keberangkatan pesawat penerbangan luar negeri ini mengalami peningkatan sebanyak 169,65% dari 17,5 ribu unit menjadi 47,1 ribu unit. Kenaikan tersebut terjadi karena penerbangan dengan tujuan luar negeri mulai dibuka kembali pasca pandemi COVID-19.

Maka dari itu pembangunan infrastruktur bandara internasional menjadi salah satu sarana prasarana yang sangat krusial. Bandara internasional mempunyai peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut dicantumkan dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 48 Tahun 2014 terkait dengan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang di dalamnya memuat tentang pentingnya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan investasi dan mendorong laju perekonomian daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan tahapan-tahapan perencanaan sejak tahun 2016 guna menindaklanjuti rencana tersebut. Dari studi yang telah dilakukan oleh pemerintah, Kabupaten Kediri menjadi lokasi pembangunan bandar udara baru di wilayah Jawa Timur. Keputusan ini berdasarkan pada kesiapan penyediaan lahan dan kesiapan penyediaan anggaran. Skema KPBU melibatkan sektor publik (pemerintah) dan sektor privat (swasta) dalam menyediakan sarana layanan publik. Van Ham dan Koppenjan dalam (Mulyani, 2021) mendefinisikan KPBU sebagai sebuah bentuk kerjasama antara sektor publik dan privat dalam jangka waktu tertentu untuk bersama-sama mengembangkan suatu produk atau layanan dengan mekanisme pembagian resiko, pendanaan, dan sumber daya yang terkait dengan produk atau jasa yang akan dihasilkan.

Pada prakteknya pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan bentuk kolaborasi dengan Gudang Garam melalui anak perusahaannya, PT. Surya Dhoho Investama sebagai sektor privat yang menyediakan sumber daya dan memegang konsesi sedangkan sektor publik yang dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung terkait regulasi kebijakan yang dapat mendorong percepatan pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Masyarakat yang bertempat di sekitar lokasi pembangunan Bandara termasuk pemerinath desa dan warga lokal berperan dalam menyediakan sumber daya manusia, mendukung kelancaran proses, dan memastikan dampak positif proyek terhadap kesejahteraan sekitar.

Dalam pembangunan infrastruktur di suatu daerah tentu berdampak pada kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada sektor perekonomian adanya pembangunan ini membantu masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usaha rumahan seperti warung makan dan tempat tinggal sementara. Selain itu, terjadi penyerapan tenaga kerja lokal *non-skill* di Desa Grogol. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pembangunan yang terjadi di daerahnya.

Pembangunan infrastruktur yang besar seperti bandara Internasional Dhoho Kediri membawa sebuah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan aktor yang memiliki peranan penting dalam kesuksesan proyek ini. Namun, pada pembangunan proyek bandara Internasional Dhoho Kediri seringkali memunculkan permasalahan pada setiap tahapan pembangunannya serta kurangnya penyerapan tenaga kerja lokal dengan kualifikasi atau skill khusus menjadi keresahan masyarakat setempat.

Terdapat setidaknya 500 orang masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, kebanyakan dari masyarakat yang terlibat memulai dengan kualifikasi pekerja *non-skill*. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penyerapan tenaga kerja dengan kualifikasi atau skill khusus dari masyarakat setempat. Berdasarkan urgensi permasalahan kurangnya penyerapan tenaga kerja dengan kualifikasi

atau *skill* khusus tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan sejauh mana hubungan antara pihak swasta, pemerintah desa, dan masyarakat yang terjalin. Proses kerjasama yang terjalin antara pihak pemerintah Desa Grogol dengan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk masih belum begitu jelas sehingga perlu untuk diperdalam lagi terkait dengan dinamika kolaborasi lintas sektor dalam penyaluran tenaga kerja untuk mendukung terrealisasinya pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, khususnya dalam konteks kerjasama antar seluruh aktor yang terlibat di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian terkait dengan analisis kerja sama penyediaan tenaga kerja dalam pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri antara Pemerintah Desa Grogol dan PT Wijaya Karya: Tinjauan Perspektif *Collaborative Governance* ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian ini berfokus pada kolaborasi yang dilakukan dalam upaya menjalin kerja sama pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri di Desa Grogol. Pengambilan fokus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data secara rinci guna menunjang penelitian yang berfokus pada proses *collaborative governance*. Penelitian ini menggunakan teori dari Ansell dan Gash dalam (Mardiyanta, 2022), yaitu: 1) *face to face dialogue*; 2) *trust building*; 3) *commitment to the process*; 4) *shared understanding*; dan 5) *intermediate outcomes*. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2, yaitu: primer berupa wawancara dengan narasumber serta observasi dan sekunder dengan studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Face-to-face dialogue

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri menunjukkan bagaimana komunikasi antara Pemerintah Desa Grogol, PT Wijaya Karya, dan masyarakat setempat merupakan kunci sukses dalam mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Menurut teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008), dialog tatap muka merupakan salah satu indikator penting yang dapat membangun kepercayaan, memfasilitasi pemahaman bersama, dan menyelesaikan masalah secara kolektif.

Tahap awal kolaborasi, forum terbuka yang melibatkan PT SDHI, kepala desa dari desa terdampak, dan perusahaan swasta yang bertanggungjawab dalam pembangunan berfungsi untuk memperkenalkan proyek, mendiskusikan kebutuhan tenaga kerja, serta menjelaskan manfaat dan dampak proyek kepada masyarakat lokal. Proses ini sejalan dengan temuan yang menekankan pentingnya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Mufidah, 2024). Melalui diskusi lanjutan, keterlibatan masyarakat lokal semakin diperkuat, di mana Kepala Desa Grogol memainkan peran aktif dalam memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam proyek ini. Namun demikian, tidak ada diskusi tatap muka atau sosialisasi pada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan kerja.

Selama masa pembangunan, yang berlangsung sekitar dua tahun, komunikasi langsung antara PT Wijaya Karya dan Kepala Desa Grogol terus berlangsung intensif, memastikan bahwa informasi tentang kebutuhan tenaga kerja tersampaikan dengan tepat dan segera ditanggapi oleh pihak desa. Proses ini mencerminkan strategi komunikasi yang efektif dalam *Collaborative Governance*.

Dialog tatap muka (*face to face dialogue*) memegang peranan penting dalam mencapai kesepakatan dan menjaga komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Dialog ini berhasil menjadi sarana untuk memecahkan masalah, seperti penyediaan tenaga kerja, dan menampung aspirasi masyarakat lokal. Meskipun pada tahap awal proses ini sangat efektif, penurunan frekuensi dan intensitas pertemuan tatap muka akibat keterbatasan waktu dan agenda padat menyebabkan peralihan ke komunikasi daring, yang sedikit mengurangi efektivitas dalam menjaga hubungan yang solid. Namun, dampak positif seperti meningkatnya keterlibatan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa kolaborasi tetap berjalan baik, meskipun ada tantangan dalam komunikasi.

Meskipun tantangan seperti kurangnya pertemuan rutin dan jajak pendapat dengan masyarakat menjadi kendala dalam menjaga kelancaran komunikasi, upaya kolaboratif ini berhasil dalam menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan proyek serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip KPBU ke-2 yang menyebutkan bahwa perlu untuk mendefinisikan peran serta tanggung jawab guna menjaga akuntabilitas dan mencegah kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, proses ini dapat membantu dalam proses komunikasi selama berlangsungnya kolaborasi antara Pemerintah Desa Grogol dan PT Wijaya Karya.

2. Trust building

Kerangka *collaborative governance*, membangun kepercayaan (*trust building*) merupakan komponen kritis yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Studi oleh (Anindya & Lokita, 2023) juga menunjukkan bahwa proses kolaborasi berhasil melalui komunikasi formal dan informal yang setara dan saling menghargai antar stakeholder. Indikator utama pada *trust building* meliputi komunikasi, komitmen, visi bersama, dan dampak kerjasama.

Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja antara PT WIKA dan masyarakat Desa Grogol telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan. Minimnya pertemuan rutin dan komunikasi terbuka terkait penyediaan tenaga kerja lokal, serta kehadiran pekerja dari luar daerah, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, ketiadaan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam program penyediaan tenaga kerja informal turut mempengaruhi akuntabilitas proyek dan melemahkan rasa kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang lebih baik dalam menjaga hubungan yang positif antara pihak-pihak terkait.

Ketika tantangan muncul, seperti preferensi awal terhadap pekerja luar daerah dibandingkan pekerja lokal, Kepala Desa Grogol dengan tegas menyuarakan aspirasi masyarakat. Diskusi lanjutan yang menitikberatkan pada penyampaian kebutuhan dan harapan masyarakat membantu memperkuat hubungan kepercayaan antara desa dan perusahaan. Menurut studi oleh Ansell et al. (2020), identifikasi motivasi dan peran para pemangku kepentingan, baik yang berpartisipasi maupun yang tidak, dapat membantu merancang strategi partisipasi yang efektif. Selama masa pembangunan, komunikasi yang terus terjalin antara PT Wijaya Karya dan Pemerintah Desa Grogol memastikan bahwa setiap perkembangan dan kebutuhan tenaga kerja tersampaikan dengan jelas dan ditindaklanjuti secara efektif.

Transparansi regulasi dalam pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri menjadi elemen penting dalam proses *trust building* antara pemangku kepentingan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip KPBU yang menjelaskan tentang lingkungan regulasi yang transparan, dengan adanya lingkungan regulasi yang jelas dan transparan dapat meminimalisir hambatan dan meningkatkan kemungkinan tercapainya nilai ekonomi dalam

proyek KPBU. Namun, dalam pelaksanaannya transparansi regulasi masih sangat minim sehingga banyak menimbulkan konflik. Dengan regulasi yang jelas dan terbuka, masyarakat mendapatkan gambaran yang lengkap tentang prosedur, hak, dan kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mengurangi ketidakpastian dan potensi konflik.

Sebagai contoh, PT Wijaya Karya secara berkala mengkomunikasikan persyaratan terkait rekrutmen tenaga kerja non-skill. Pendekatan ini kurang efektif jika bercermin pada pandangan Ansell dan Gash (2008), yang menekankan bahwa transparansi regulasi meningkatkan rasa kepercayaan, karena pemangku kepentingan merasa dihargai dan memiliki pemahaman yang sama terhadap proses yang berlangsung. Regulasi yang jelas dapat membuat seluruh pihak yang terlibat merasa aman dan memberikan kontribusi lebih maksimal dalam proyek, sehingga memperkuat komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

3. Commitment to the process

Komitmen terhadap proses (*commitment to the process*) adalah elemen kunci dalam *collaborative governance*, yang mencakup kesediaan para pemangku kepentingan untuk secara aktif terlibat dan mempertahankan kerjasama sepanjang waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan *collaborative governance* sangat bergantung pada tingkat komitmen dari semua pihak yang terlibat, karena komitmen ini mendorong partisipasi yang konsisten, pengambilan keputusan bersama, dan penyelesaian konflik yang efektif.

Agustina & Pradana (2023), mengedepankan asas “saling” dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada rasa bekerja mandiri karena kedua pihak sama-sama menjalankan wewenang serta tanggungjawab dengan maksimal. Melalui pembagian sumber daya dan tanggung jawab yang jelas, serta interaksi yang teratur dan transparan, tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Dalam konteks pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, komitmen terhadap proses antara Kepala Desa Grogol dan PT Wijaya Karya terlihat melalui pertemuan tatap muka serta komunikasi melalui pesan singkat yang intens. Keterlibatan masyarakat dalam proses diskusi masih sangat minim namun tidak menghambat jalannya proses pembangunan bandara.

Tahap awal kolaborasi, forum terbuka diadakan untuk memperkenalkan proyek dan membahas kebutuhan tenaga kerja, menunjukkan komitmen awal dari semua pihak. Kemudian, ketika timbul masalah, seperti preferensi awal terhadap pekerja luar daerah, Kepala Desa Grogol menyampaikan perlunya keterlibatan masyarakat lokal pada PT WIKI guna menunjukkan pentingnya kesediaan untuk beradaptasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan kolaborasi dalam proyek pembangunan bandara sangat dipengaruhi oleh komitmen kuat dari seluruh stakeholder, terutama Pemerintah Desa Grogol. Meskipun tidak ada pendekatan khusus dalam perekrutan tenaga kerja, keterlibatan desa dan komunikasi satu pintu melalui kepala desa menunjukkan efektivitas kolaborasi. Forum terbuka dan mekanisme pengaduan memberikan masyarakat ruang untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Temuan ini menekankan bahwa komitmen untuk menjaga transparansi dan keterlibatan aktif dari semua pihak merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan kolaborasi.

Pengalaman ini menggarisbawahi pentingnya komitmen berkelanjutan dalam *collaborative governance*, sebagaimana diuraikan oleh berbagai teori dan penelitian terbaru dalam bidang ini. Hal tersebut selaras dengan prinsip KPBU yakni, membangun kerangka konstitusional yang didalamnya mencerminkan komitmen terhadap proses karena menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan dan masyarakat sipil. Dengan memahami dan berpartisipasi aktif, stakeholder menunjukkan komitmen terhadap keberhasilan proyek.

4.1.2 Shared Understanding

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi antara Pemerintah Desa Grogol dan PT Wijaya Karya (PT Wika) dalam penyediaan tenaga kerja untuk pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, terlihat bahwa penerapan indikator *shared understanding* dalam kerangka *collaborative governance* menjadi bagian krusial. Proses diskusi tatap muka yang dilakukan antara PT WIKA dan Pemerintah Desa Grogol berperan signifikan dalam menyamakan persepsi mengenai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) yang menekankan bahwa dialog tatap muka dapat meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Melalui diskusi terbuka, semua pihak dapat mengklarifikasi peran mereka, mengurangi potensi konflik serta menyelaraskan ekspektasi untuk mencapai tujuan bersama.

Keselarasan persepsi atau *shared understanding* di antara pemangku kepentingan, seperti PT WIKA dan Pemerintah Desa Grogol, berperan penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Namun, konflik yang muncul akibat ketidakpahaman sebagian masyarakat lokal terkait proses *lay off* menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dinamika proyek dan potensi perubahan jumlah tenaga kerja di setiap tahapan pembangunan, protes dari masyarakat dapat diminimalisir, yang pada akhirnya mendukung kelancaran dan keberlanjutan kolaborasi proyek ini. Sosialisasi yang lebih intens tidak hanya akan mengurangi resistensi tetapi juga memastikan bahwa semua pihak memiliki ekspektasi yang realistis dan dapat berkontribusi secara positif terhadap proyek tersebut.

Meskipun PT Wijaya Karya tidak menyediakan program pelatihan khusus bagi pekerja lokal karena sifat pekerjaan yang praktis, pemahaman bersama tentang keterampilan dasar yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal membantu efisiensi waktu dan biaya pelatihan tambahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunawan & Ma`ruf Farid (2020), yang menyoroti tentang pentingnya untuk saling mengetahui tugas, pokok, dan fungsi serta tujuan yang sama dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Pemahaman bersama antara PT WIKA dan Pemerintah Desa Grogol memungkinkan kerjasama yang efektif, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan peluang kerja dalam proyek pembangunan bandara.

Prinsip membangun kerangka konstitusional yang ada pada KPBU mendukung *shared understanding* dengan mendorong pemangku kepentingan untuk memahami secara manfaat, risiko proyek, dan mengintegrasikan keterlibatan masyarakat sipil dalam seluruh tahapan proses. Dalam konteks pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, keterlibatan masyarakat Desa Grogol dalam diskusi-diskusi yang berlangsung masih sangat minim sehingga memicu potensi resistensi. Seperti adanya aksi demonstrasi terkait dengan upaya pembebasan lahan.

Memahami potensi manfaat ekonomi serta risiko yang mungkin timbul, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat berpartisipasi lebih aktif dan berkontribusi secara positif dalam mencapai tujuan bersama. Proses ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2008), yang menegaskan bahwa *shared understanding* tidak hanya tentang berbagi informasi, tetapi juga tentang menciptakan ruang dialog yang memungkinkan setiap pihak untuk menyuarakan kekhawatiran dan aspirasinya secara setara.

Dengan demikian, semua pihak dapat bekerja dengan tujuan yang selaras, memperkuat kerja sama, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan harapan bersama. Penerapan prinsip ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kolaborasi tetapi juga menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan proyek melalui dukungan masyarakat yang lebih luas.

4.1.3 Intermediate Outcomes

Analisis mengenai *Collaborative Governance* dalam konteks pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri menunjukkan bahwa capaian *intermediate outcomes* yang dihasilkan dari kolaborasi antara Kepala Desa Grogol, PT Wijaya Karya, dan masyarakat setempat sangat signifikan. Hasil sementara ini menjadi indikator penting keberhasilan kolaborasi sebelum tujuan akhir tercapai.

Salah satu *intermediate outcomes* yang paling menonjol adalah penyediaan tenaga kerja lokal dan pengurangan angka pengangguran. Melalui komunikasi dan dialog yang terstruktur, PT Wijaya Karya dan Pemerintah Desa Grogol berhasil memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal, meskipun sempat terjadi kendala terkait pekerja dari luar daerah. Proses ini menunjukkan kemampuan kedua pihak untuk beradaptasi dan merespons umpan balik dari masyarakat.

Penurunan angka pengangguran setidaknya 60% dari jumlah pengangguran yang ada mencerminkan peningkatan signifikan dalam penyediaan tenaga kerja sejak dimulainya proyek pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Hal ini menunjukkan peran krusial pihak swasta yang terlibat dalam proyek tersebut, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan bandara ini tidak hanya membantu mengatasi permasalahan sosial yang muncul pada tahun 2014, yakni tingginya angka pengangguran, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja.

Amelinda & Kriswibowo (2021) menyampaikan hal serupa bahwasanya, hasil sementara yang diperoleh merupakan tujuan awal terjalannya kerjasama walaupun terdapat kendala dan keluhan dari masyarakat. Prinsip KPBU terkait dengan pemantauan berkesinambungan selama tahap konstruksi dan operasional merupakan salah satu aspek hasil sementara yang dapat dicapai dalam konteks pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri. Pemantauan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung pada pembangunan bandara. Pemantauan ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan penyesuaian tepat waktu.

Kolaborasi antara masyarakat lokal, pemerintah desa, dan PT WIKA telah menghasilkan partisipasi aktif masyarakat dalam proyek pembangunan. Selain memberikan lapangan kerja, kolaborasi ini juga berkontribusi pada peningkatan pengalaman dan keterampilan masyarakat yang bermanfaat untuk jangka panjang. Meskipun terdapat tantangan dalam ketersediaan tenaga kerja profesional lokal, komitmen untuk melibatkan masyarakat secara berkelanjutan dalam aspek-aspek pembangunan, termasuk pemeliharaan lingkungan, telah menciptakan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi desa.

Dengan demikian, *Collaborative Governance* dalam proyek ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi ekonomi dan sosial masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat kolaborasi jangka panjang antara Pemerintah Desa Grogol, PT Wijaya Karya, dan masyarakat setempat. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi dinamis dan adaptif merupakan kunci untuk keberhasilan jangka panjang proyek pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam perspektif *collaborative governance* pada proses kerja sama penyediaan tenaga kerja antara Pemerintah Desa Grogol dengan PT Wijaya Karya pada pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi berjalan sesuai dengan harapan seluruh pihak yang terlibat. Hal tersebut dianalisis berdasarkan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell and Gash (2007), sebagai berikut:

Dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, *face-to-face dialogue* diimplementasikan untuk membahas kolaborasi antara PT Wijaya Karya dan pemerintah desa, terutama dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, kurangnya pertemuan rutin dengan masyarakat menyebabkan potensi kesalahpahaman terkait pembagian peran serta kewajiban. Terbatasnya dialog langsung ini menjadi kendala dalam memastikan bahwa semua aspirasi masyarakat Desa Grogol dapat terakomodasi, khususnya terkait pembebasan lahan dan rekrutmen tenaga kerja.

Trust building ditunjukkan melalui komunikasi intens antara PT Wijaya Karya dan Kepala Desa Grogol, yang berhasil menciptakan relasi yang saling menguntungkan. Meskipun demikian, rekrutmen pekerja dari luar daerah menjadi pemicu kekecewaan di masyarakat, yang berdampak pada resistensi di tahap awal. Masyarakat merasa kurang dihargai, terutama dalam konteks imbalan pembebasan lahan, sehingga kepercayaan antara masyarakat dan pihak perusahaan belum sepenuhnya terbangun.

Commitment to the process terlihat konsisten di kalangan pemerintah desa dan pihak perusahaan, meski ada tantangan di lapangan. Pembangunan terus berjalan dengan baik dan memberikan hasil sementara yang berdampak positif, seperti prioritas bagi tenaga kerja lokal dan pemberdayaan ibu-ibu Desa Grogol dalam penyediaan konsumsi bagi pekerja. Keseluruhan proses *collaborative governance* ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari para pihak, sehingga membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan ekonomi setempat.

Shared understanding dalam proses ini tampak kurang maksimal karena minimnya sosialisasi menyeluruh dengan masyarakat. Ketidakhahaman sebagian masyarakat terhadap tujuan proyek serta kurangnya transparansi dalam pembebasan lahan dan penyerapan tenaga kerja menimbulkan resistensi. Dengan adanya pertemuan lebih rutin dan keterbukaan informasi, pemahaman yang lebih baik mengenai peran serta manfaat proyek dapat terwujud, meminimalkan konflik.

Intermediate outcomes menunjukkan hasil yang sangat baik. Harapan masyarakat banyak terpenuhi dengan adanya penyerapan tenaga kerja lokal, kompensasi pada wilayah yang terdampak, dan upah yang sesuai dengan kompetensi kerja dari setiap individu. Hal tersebut membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian pada *collaborative governance* penyerapan tenaga kerja lokal pada pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, peneliti merekomendasikan beberapa saran terkait dengan proses pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Desa Grogol dengan PT Wijaya Karya Tbk, yakni:

1. Menginisiasi pertemuan rutin dengan PT Wijaya Karya dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri, guna memastikan aspirasi serta kendala disampaikan dan diselesaikan tepat waktu.
2. Membuat MoU atau perjanjian kerja sama guna mengetahui tanggungjawab dan hak dari setiap stakeholder yang terlibat dalam proses kerja sama.
3. Memperkuat manfaat proyek bagi masyarakat lokal dengan koordinasi yang lebih baik, pemerintah desa serta pihak swasta yang terlibat dapat memastikan bahwa manfaat dari pembangunan bandara terus dirasakan oleh masyarakat Desa Grogol dan sekitarnya.

Referensi

- Agustina, Y., & Pradana, G. W. (2023). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Negeri Surabaya di Kabupaten Magetan. *Publika*, 11(3), 2107–2122.
- Amelinda, A. D., & Kriswibowo, A. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN

- WASTE MANAGEMENT (Study In The Integrated Waste Management Site Of Tambakrejo Area, Sidoarjo Regency). *Dia*, 19(1), 29–40.
<https://doi.org/10.30996/dia.v15i2.4842>
- Anindya, A., & Lokita, Ra. A. M. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan Komunikasi Lingkungan yang Efektif di Era Digital. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa*, 8(1), 25–37.
- Ansell, C., Doberstein, C., Henderson, H., Siddiki, S., & ‘t Hart, P. (2020). Understanding inclusion in collaborative governance: a mixed methods approach. *Policy and Society*, 39(4), 570–591. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BPS. (2023). *Statistik Transportasi Udara*.
- Gunawan, A., & Ma`ruf Farid, M. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Journal of Public Sector Innovation*, 1–10.
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmQ4NGZiNjBkN2NiOTdjYjBkM2U2MTdiNzcxNzcxM2QxY2FhNTVIMQ==.pdf
- Mardiyanta, M. N. F. S. A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Mufidah, N. T. (2024). *Impelementasi Kebijakan Bantuan Laptop Gratis untuk Meningkatkan Pembelajaran Digital Tingkat Dasar Negeri di Kelurahan Madiun Lor, Kota Madiun*. 12, 172–181.
- Mulyani, S. (2021). Critical Success Factors in Public-Private Partnership. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31953>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Nasir, D. B. (2021). *DIKTAT TEORI-TEORI PEMBANGUNAN*.
Peraturan Presiden (PP) Nomor 48 Tahun 2014. (2014). 2025.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.